

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN  
KESEHATAN KERJA BAGI PETUGAS PEMADAM  
KEBAKARAN DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENANGGULANGAN BENCANA  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**NURUL AULIA  
07011381621108**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN  
KESEHATAN KERJA BAGI PETUGAS PEMADAM  
KEBAKARAN DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENANGGULANGAN BENCANA  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

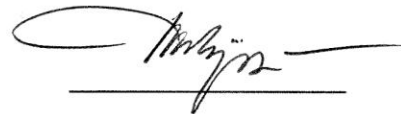
**Nurul Aulia  
07011381621108**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,**

**2020**

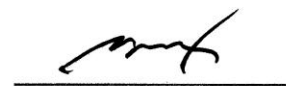
**Pembimbing I**

**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si  
NIP. 196511171990031004**



**Pembimbing II**

**Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001**



## HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PALEMBANG

### SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada tanggal 21 Juli 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

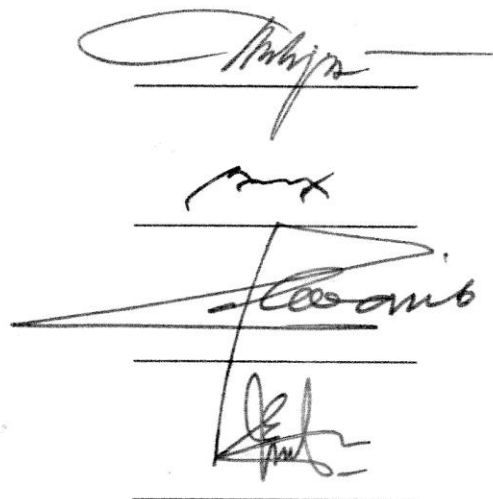
#### TIM PENGUJI SKRIPSI

**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si**  
NIP. 196511171990031004  
Ketua

**Drs. Mardianto, M.Si**  
NIP. 196211251989121001  
Anggota

**Drs. H. Joko Siswanto, M.Si**  
NIP. 195706051985031003  
Anggota

**Ermanovida, S.Sos., M.Si**  
NIP. 196911191998032001  
Anggota



Palembang, Juli 2020  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya  
Dekan,



**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si**  
NIP. 196311061990031001

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“The downfall and success of a country is determined by the superiority of its public policies, not by natural resources, strategic position, even politics. With superior policy, the government can manage the country effectively.”  
( Dr. Ir. M. Hatta Rajasa)**

**“Kejatuhan dan keberhasilan suatu negara ditentukan oleh keunggulan kebijakan publiknya, bukan oleh sumber daya alam, posisi strategis, bahkan politiknya. Dengan kebijakan unggul, pemerintah dapat mengelola negara dengan efektif.”  
(Dr. Ir. M. Hatta Rajasa)**

**Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk:**

- 1. Kedua Orangtuaku Tersayang, Ayah Muhammad Amir dan Ibu Hayati**
- 2. Adik Kandung Tersayang Muhammad Hafiz**
- 3. Seluruh Dosen Administrasi Publik yang Saya Hormati dan Bersabar dalam Membimbing Saya**
- 4. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridho dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang” yang merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Publik

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayah Muhammad Amir dan Ibu Hayati, serta adik saya yang selalu mendoakan dan memberi dukungan semangat kepada saya.
2. Sahabat kecil saya, Sherina Fahira dan Shandra Ismiaty yang selalu memberikan hiburan dan semangat di tengah kepadatan waktu kalian berdua untuk membuat skripsi serta memberi kritik dan saran yang membangun untuk saya.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah sabar membimbing, memberikan ilmu dan masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama melaksanakan studi kuliah.
9. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya kampus Palembang.
10. Bapak Akmal Wijaya, S. Sos., M.Si selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PK-PB Kota Palembang, dan bapak H. Isranedy, SE., M.Si selaku Kepala Bidang Operasional Pemadaman Dinas PK-PB Kota Palembang, serta bapak Muhammad Hardiansyah, SE selaku Kepala Seksi Operasi Pemadaman Dinas PK-PB Kota Palembang yang telah memberikan informasi terkait skripsi saya ini.
11. Seluruh teman seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah bersama-sama menempuh perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dari semua pihak demi skripsi ini. Semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat dikemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Palembang, Agustus 2020

Nurul Aulia

## ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of accidents experienced by firefighting operational officers on duty caused by a lack of understanding of the Standard Operation Procedure (SOP) on Orientation of Occupational Safety and Health (K3) Operational Procedures for Fire Fighting in the Field of Operational Extinguishing of the PK-PB Office in Palembang City with No. Document 440 / 142.A / UKP-SOP / DPKPB / 2018 which is applied in the Palembang City Fire and Disaster Management Agency. The purpose of this study was to determine the successful implementation of occupational safety and health policies for firefighters in the Palembang City Fire and Disaster Management Agency. This research uses qualitative methods with the types of primary data sources and secondary data. To measure the success of the policy in this study using the Ripley and Franklin Implementation theory. The results of the implementation of the Occupational Safety and Health Policy for Firefighters in the Palembang City Fire and Disaster Management Agency showed that the facilities and infrastructure used by the Palembang City Fire and Disaster Management Agency were not in accordance with the National standards because the conditions of the facilities and infrastructure were not sufficient can improve the performance and safety of firefighters. the routine implementation of training education for firefighting operations officers at the Palembang City Fire and Disaster Management Agency is very mandatory for firefighters to reduce the risk of accidents when undergoing firefighting duties in the field. The target in measuring the achievements of the Palembang City fire program is that there are still obstacles in the percentage of the speed of response time for disasters and fires, the scope of fire prevention and prevention services and the percentage of firefighters who meet the qualification standards.

**Keywords: Extinguisher Safety**

**Advisor I**



**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si**  
NIP. 196511171990031004

**Advisor II**



**Drs. Mardianto, M.Si**  
NIP. 196211251989121001

**Palembang, July 2020**  
**Head of the Department of Public Administration**  
**faculty of Social Science and Political Science**  
**Sriwijaya University**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP. 198108272009121002

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kecelakaan yang dialami oleh petugas operasional pemadam saat bertugas yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai Standard Operation Prosedur (SOP) tentang Orientasi Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Operasional Pemadam Kebakaran pada Bidang Operasional Pemadaman Dinas PK-PB Kota Palembang dengan No. Dokumen 440/142.A/UKP-SOP/DPKPB/2018 yang diterapkan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis sumber data primer dan data sekunder. Untuk mengukur keberhasilan kebijakan dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi Ripley dan Franklin. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang menunjukkan sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang belum sesuai dengan standar Nasional karena kondisi sarana dan prasarananya belum cukup memadai untuk bisa meningkatkan kinerja dan keselamatan para petugas operasi pemadam kebakaran. pelaksanaan rutin pendidikan pelatihan pada para petugas operasi pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang sangat wajib dilakukan oleh petugas operasi pemadam kebakaran guna mengurangi resiko kecelakaan petugas pada saat menjalani tugas memadamkan kebakaran di lapangan. Target dalam pengukuran capaian program pemadam kebakaran Kota Palembang masih terdapat hambatan pada persentase kecepatan waktu tanggap bencana dan kebakaran, cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi.

**Kata kunci : Keselamatan Pemadam**

**Pembimbing I**



**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si**  
NIP. 196511171990031004

**Pembimbing II**



**Drs. Mardianto, M.Si**  
NIP. 196211251989121001

**Palembang, Juli 2020**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP. 198108272009121002

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH SINGKATAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
B. Implementasi Kebijakan .....	11
C. Model-model Implementasi Kebijakan .....	13
D. Teori Implementasi yang digunakan .....	17
E. Keselamatan dan Kesehatan Kerja .....	17
F. Kerangka Pemikiran .....	20
G. Penelitian Terdahulu .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian .....	23
B. Aspek Penelitian .....	23
C. Definisi Konsep .....	23
D. Fokus Penelitian .....	25
E. Jenis dan Sumber Data .....	26
F. Teknik Pengumpulan Data .....	26
G. Teknik Penentuan Informan .....	27
H. Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Kota Palembang .....	30
1. Sejarah Kota Palembang .....	30
2. Pemerintahan Kota Palembang .....	30
3. Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang .....	31
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Palembang .....	32
B. Gambaran Umum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang .....	33



1. Sejarah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang .....	33
2. Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang .....	34
3. Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang .....	35
4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang .....	36
C. Hasil dan Pembahasan .....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Persentase Kejadian Kebakaran Tahun 2013-2018 .....	3
1.2 Data Jumlah Kecelakaan Petugas Operasional Pemadam Kebakaran .....	6
1.3 Data perbulan kejadian kebakaran dan kecelakaan petugas .....	7
2.1 Penelitian Terdahulu .....	21
3.1 Fokus Penelitian .....	25
4.1 Jumlah Kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang .....	50
4.2 Pengukuran capaian program pemadam kebakaran Kota Palembang .....	58
4.2.1 Jumlah Ideal-exiting pelayanan penanggulangan bahaya Kota Palembang .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah personil operasional pemadam Dinas PK-PB Kota Palembang.....	5
2. Model George C. Edward III .....	15
3. Lambang Kota Palembang .....	31
4. Bagan struktur organisasi Dinas PK-PB Kota Palembang .....	35
5. SOP (K3) Operasional pemadam kebakaran pada bidang operasional pemadaman Dinas PK-PB Kota Palembang .....	47
6. Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran .....	54
7. Kualifikasi pendidikan pemadam di Dinas PK-PB Kota Palembang .....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara .....	70
2. Surat Izin Penelitian .....	72
3. Surat Izin Penelitian melalui Badan Kesbangpol Palembang .....	73
4. Surat Balasan Penelitian .....	74
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	75
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi .....	76
7. SOP No. Dokumen 440/142.A/UKP-SOP/DPKPB/2018 Tentang Orientasi Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja Operasional Pemadam Kebakaran pada Bidang Operasional Dinas PK-PB Kota Palembang .....	79
8. UU RI No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja .....	80
9. Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja .....	87
10. Dokumentasi Peneliti .....	104

## DAFTAR ISTILAH SINGKATAN

APD	: Alat Pelindung Diri
Damkar	: Pemadam Kebakaran
DPKPB	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
K3	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
PK-PB	: Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
P3K	: Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
RI	: Republik Indonesia
SOP	: Standard Operation Prosedur
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
UU	: Undang-Undang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang giat-giatnya membangun untuk meningkatkan pembangunan disegala sektor dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat indonesia. Melihat kenyataan tersebut keselamatan dan kesehatan kerja merupakan faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan agar dapat menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan demi terwujudnya kesejahteraan para pekerja.

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, masalah keselamatan kerja merupakan faktor penting yang harus menjadi perhatian semua pihak. Keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan tersebut. Banyak hal yang dijadikan parameter penilaian terhadap keberhasilan suatu pekerjaan. Pekerjaan dinilai berhasil apabila keselamatan dan keamanan sumber daya yang ada terjamin, dapat terselesaikan, memberi keuntungan dan menambah kepuasan kepada semua pihak. Keselamatan kerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan maupun oleh manajemen. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia masih sering terabaikan.

Banyak perusahaan dan instansi pemerintahan yang melibatkan tenaga kerja yang diikuti dengan resiko pekerjaan yang tinggi. Resiko pekerjaan yang tinggi disebabkan karena kurangnya keterampilan dan latihan kerja. Salah satu pekerjaan dengan resiko pekerjaan yang tinggi adalah petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran merupakan orang dengan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi berupa luka-luka dan penyakit akibat kerja yang dapat mengakibatkan cacat dan kematian. Faktanya

bahwa lingkungan kerja selama keadaan darurat dan tak terduga serta petugas pemadam kebakaran yang belum siap akan kemungkinan terjadinya kecelakaan, membutuhkan pengalaman pelatihan dan pendidikan serta pengembangan alat pelindung diri untuk melindungi petugas pemadam kebakaran dari bahaya dan resiko pekerjaannya.

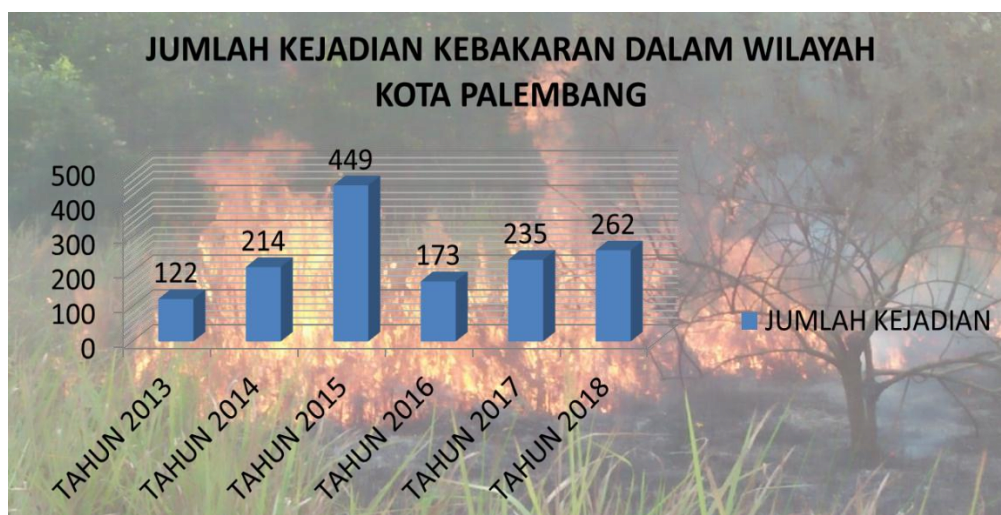
Isu keselamatan kerja adalah hal penting yang menjadi perhatian pemerintah. Terbukti pada tahun 1970 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang didalamnya mengatur tentang keselamatan kerja di tempat kerja. Kemudian pada tahun 2003 di keluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur segala hak pekerja atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Undang-Undang ini dibentuk sebagai penunjang dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970. Resiko kecelakaan dan penyakit kerja dapat dihadapi oleh siapa saja dengan lokasi kerja yang memiliki berbagai ancaman. Terlebih lokasi kejadian kebakaran yang menjadi lokasi kerja pasukan pemadam kebakaran penuh dengan bahaya membuat petugas pemadam kebakaran memiliki resiko kecelakaan dan penyakit kerja yang tinggi. Oleh karena itu, petugas operasional pemadam kebakaran perlu mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerjanya.

Kebakaran merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kerugian pada jiwa, harta benda, peralatan produksi, proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja. Khususnya pada kejadian kebakaran yang besar dapat melumpuhkan bahkan menghentikan proses usaha, sehingga ini memberikan kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, pemadaman kebakaran dituntut selalu siaga menghadapi setiap kejadian bencana, pasalnya bencana bisa datang tiba-tiba tanpa bisa diprediksi sebelumnya.

Kota Palembang adalah ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota dengan luas wilayah 400,61 km<sup>2</sup>

ini dihuni oleh lebih dari 1,6 juta penduduk pada 2018. Palembang merupakan daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, untuk itu kebakaran menjadi salah satu bencana yang harus diwaspadai bagi wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

**Tabel 1.1 Persentase kejadian kebakaran Tahun 2013-2018**



Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang, 2019

Berdasarkan data diatas, sepanjang tahun 2018 petugas pemadam kebakaran telah menangani 262 kasus kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 235 kasus. Tingginya kejadian kebakaran di Kota Palembang berbanding lurus dengan tingginya tingkat resiko kerja yang dihadapi oleh petugas operasional pemadam kebakaran yang turun ke lokasi kebakaran. Resiko kerja yang dihadapi oleh petugas operasional pemadam kebakaran bukan hanya saat di medan kebakaran, tetapi dimulai dari persiapan keberangkatan, saat perjalanan menuju lokasi kebakaran dan saat proses penyelamatan. Hal ini menjadi lebih beresiko karena Dinas Pemadam Kebakaran memiliki SOP *Response Time* 15 menit seperti yang tertulis dalam Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 11/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan :

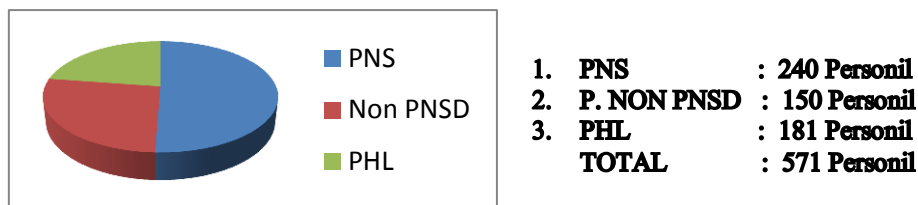
“Waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi di Indonesia tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri atas : a) Waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman selama 5 menit. b) Waktu



perjalanan dari pos pemadaman menuju lokasi selama 5 menit. c) Waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan selama 5 menit”.

Untuk 15 menit *Response time* itu bukan semata-mata dibuat tanpa alasan oleh pemerintah, melainkan merupakan waktu tanggap pertolongan terhadap kebakaran agar dapat meminimalisir kerugian berupa korban jiwa maupun harta benda. Dengan demikian membuat petugas operasional pemadam kebakaran memiliki banyak resiko kerja dimulai dari saat persiapan keberangkatan, serta saat perjalanan menuju lokasi kebakaran, saat proses pemadaman dan penyelamatan.

Petugas operasional pemadam kebakaran mengusahakan api dapat padam dengan cepat agar area kebakaran tidak semakin luas. Resiko yang terjadi saat proses pemadaman api apabila di dalam bangunan masih terdapat korban yang harus diselamatkan, petugas operasional pemadam kebakaran masuk kedalam kobaran api dan menyelamatkan orang yang masih ada di dalam bangunan gedung yang terbakar. Selain untuk menolong korban jiwa yang terjebak dalam gedung, alasan lain yang membuat petugas pemadam kebakaran masuk ke dalam bangunan yang terbakar adalah untuk memadamkan api dari dalam bangunan. Saat melakukan pemadaman dari dalam bangunan, petugas pemadam kebakaran tidak tahu menahu bahan-bahan dan barang-barang apa saja yang ada di dalam bangunan yang sedang terbakar. Tidak jarang di dalam gedung terdapat bahan-bahan peledak ataupun gas-gas berbahaya yang dapat berinteraksi negatif dengan api. Bahan ini tentu membahayakan petugas yang masuk ke dalam bangunan. Resiko yang sama juga terjadi saat terdapat barang-barang berbahaya yang dapat membahayakan nyawa petugas pemadam kebakaran seperti besi, paku dan barang berbahaya lainnya. Barang ini membahayakan petugas kebakaran yang menyisir bangunan yang sedang terbakar.



**Gambar 1. Jumlah Personil Operasional Pemadam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang**

Sumber Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang, 2019

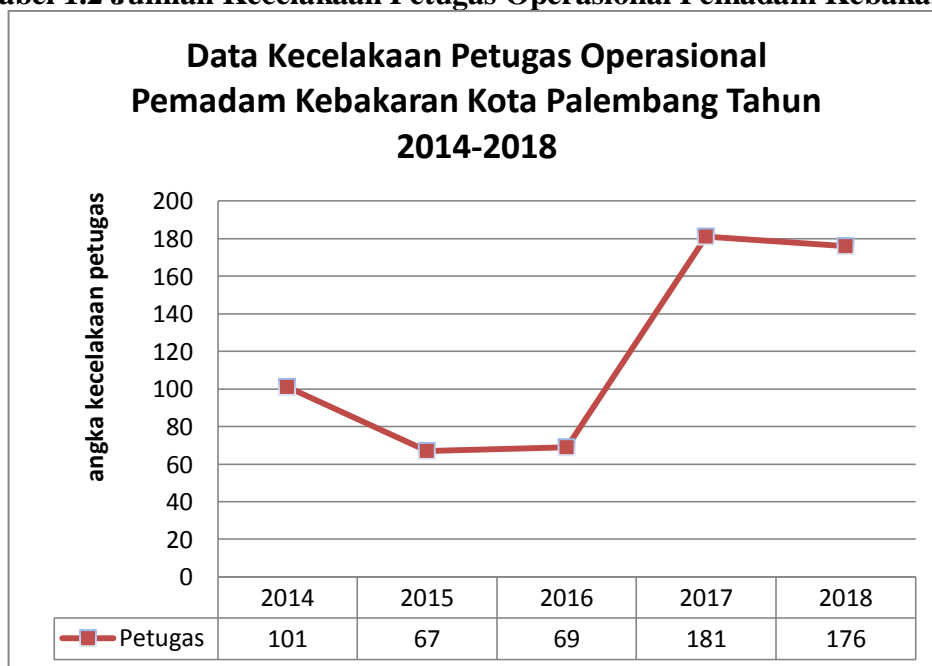
Dengan resiko keselamatan yang ditanggung oleh petugas pemadam kebakaran, dimana jumlah keseluruhan personil pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang yaitu 571 personil, maka perlunya implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja beresiko tinggi khususnya petugas operasional pemadam kebakaran di lingkungan kerja dan sesuai Standard Operation Prosedur (SOP) tentang Orientasi Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Operasional Pemadam Kebakaran pada Bidang Operasional Pemadaman Dinas PK-PB Kota Palembang dengan No. Dokumen 440/142.A/UKP-SOP/DPKPB/2018 yang diterapkan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang, yang menjelaskan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yaitu :

1. Operasi Pemadaman wajib memperhatikan keselamatan petugas operasional terutama dari paparan api dan lokalisir pejalaran api dalam melakukan operasi pemadaman terkait keselamatan diri, petugas pemadam memiliki kewajiban antara lain:
  - a. Berpasangan saat memasuki tempat kejadian kebakaran
  - b. Masuk lokasi dengan sepengetahuan Kepala Regu atau Pejabat lain yang ditunjuk
  - c. Mengenakan perlengkapan pelindung (APD) perorangan sesuai standar yang ditetapkan
  - d. Memperhatikan taktik dan strategi pemadaman
2. Petugas mencatat secara rinci setiap kecelakaan kerja pada petugas operasional pemadam yang terjadi di lokasi pemadam kebakaran
3. Sistem Perawatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

4. Setiap Petugas Operasional pemadam kebakaran wajib mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dalam upaya meningkatkan pengetahuan akan keselamatan saat bertugas melakukan pemadaman kebakaran
5. Setiap Petugas Operasional pemadam kebakaran melaksanakan rutin Pemeriksaan Kesehatan (*medical checkup*).

Dalam Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Operasional Pemadam Kebakaran pada Bidang Operasional Pemadaman Dinas PK-PB Kota Palembang yang disebutkan diatas, jika berjalan baik terhadap petugas operasional pemadam kebakaran berarti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang berhasil melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Operasional Pemadam Kebakaran, jika salah satu atau lebih dari indikator prosedur pendukung pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Operasional Pemadam Kebakaran yang telah disebutkan tidak terlaksana, maka masih adanya permasalahan pada pelaksanaan kebijakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Operasional Pemadam Kebakaran tersebut baik permasalahan tersebut terjadi pada petugas operasional pemadam maupun unit kerja yang terkait di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.

**Tabel 1.2 Jumlah Kecelakaan Petugas Operasional Pemadam Kebakaran**



Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang, 2019

**Tabel 1.3 Data Perbulan Kejadian Kebakaran dan Kecelakaan**

Perbulan 2018	Kejadian kebakaran	Kejadian kecelakaan petugas
Januari	9	5
Februari	9	6
Maret	13	9
April	16	11
Mei	14	9
Juni	14	7
Juli	28	17
Agustus	60	42
September	51	39
Oktober	25	17
November	13	9
Desember	10	5
Jumlah	262	176

*Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang, 2019*

Berdasarkan fakta dilapangan, dari tabel 1.2 diatas masih cenderung banyak petugas operasional yang kecelakaan saat bertugas setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kecelakaan yang dialami oleh petugas operasional pemadam kebakaran ada pada tingkat yang sedang dan parah. Pada tingkat sedang ialah luka bakar dengan derajat 3-16 %, luka tusuk paku, luka gores di lengan, luka sobek di tangan dan kaki, sesak napas, serta luka lecet. Sedangkan pada tingkat yang parah ialah tersengat listrik, tertimpa tembok yang roboh, serta ada yang sampai meninggal di tempat. Dari tabel 1.2 diatas, pada tahun 2015 dari 67 petugas pemadam yang kecelakaan, satu petugas tersengat listrik. Pada tahun 2016 dari 69 petugas yang kecelakaan, dua petugas diantaranya meninggal di tempat kejadian. Kemudian pada tahun 2018, dari 176 petugas itu, diantaranya satu orang tertimpa tembok yang runtuh dan sempat dilarikan ke rumah sakit.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dirumuskan permasalahan penelitian yakni :

1. Bagaimana keberhasilan Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui keberhasilan Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.
2. Mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang ?

## **D. Manfaat Penelitian**

Ada dua manfaat yang diperoleh dalam rancangan penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menambah pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Publik, yaitu pada bidang Kebijakan Publik, khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja Bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi sekaligus masukan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang mengenai implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1) : 1-11
- Alfatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : UNPAD Pres
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Kountur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PPM
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Syafie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 2016. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Palembang : Universitas Sriwijaya

### Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 11/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan
- Standard Operation Prosedur (SOP) tentang Orientasi Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Operasional Pemadam Kebakaran pada Bidang Operasional Pemadaman Dinas PK-PB Kota Palembang dengan No. Dokumen 440/142.A/UKP-SOP/DPKPB/2018

### Sumber lain-lain :

- [https://www.academia.edu/7440214/ANALISIS\\_PENELITIAN\\_KUALITATIF\\_MODEL\\_MILES\\_dan\\_HUBERMAN](https://www.academia.edu/7440214/ANALISIS_PENELITIAN_KUALITATIF_MODEL_MILES_dan_HUBERMAN) (diakses 28 Oktober 2019)

[https:// www.palembang.go.id/new/](https://www.palembang.go.id/new/) (diakses 8 Februari 2020)

<https://media.neliti.com/media/publications/218199-implementasi-kebijakan-perspektif-model.pdf> (diakses 28 Oktober 2019)

Imronah. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process*, (Online), (<https://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 3 November 2019)

Putera, Roni Ekha. 2015. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan dalam Pencapaianmillenium Development Goals. *Mimbar*, (Online), Vol. 31, No, 1 (<https://media.neliti.com>, diakses 3 November 2019)

Rinto, Teori Implementasi Kebijakan Publik. Dalam (<http://rintosusantotempirai.blogspot.com/2014/10/teori-implementasi-kebijakan-publik.html> diakses Tanggal 3 November 2019)